



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**I. DATA PRIBADI**

- Nama** : IBRAHIM BAFADAL
- Jabatan** : WAKIL REKTOR I (BIDANG PENDIDIKAN, KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI)
- NHK** : 210298

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **3.650.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 400 m<sup>2</sup>/170 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
- Tanah Seluas 200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 142 m<sup>2</sup>/320 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.150.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 84 m<sup>2</sup>/102 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **659.100.000**

- MOBIL, HONDA JAZZ GK5 5.1 RS CVT (CKD) Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
- MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
- MOTOR, YAMAHA AEROX 155 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
- MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.100.000
- MOBIL, TOYOTA ZENIX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **56.250.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	906.014.938
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.271.364.938
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.271.364.938

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.